

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

Risma Yanti¹, Nartin²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Lakidende Unaaha
Email: ry892902@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil analisis memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh: (1) keberadaan kelompok-kelompok yang menjadi wadah penyaluran partisipasi warga, (2) kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan, dan (3) kegiatan yang memberikan ruang bagi warga menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, masih ditemukan kendala, antara lain tidak semua warga memahami cara menyampaikan aspirasi secara efektif, terutama mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau kesibukan pekerjaan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Lalonggowuna dalam pembangunan terlihat dari keterlibatan warga pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa, antara lain: 1. Keterlibatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program (mis. infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan). 2. Gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan kecil, atau pembersihan lingkungan. 3. Keaktifan dalam kelompok masyarakat (Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, LPM) yang berperan dalam pemberdayaan dan penyampaian aspirasi kelompok. 4. Partisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi, termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan pertanian, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. 5. Kontribusi material atau dana swadaya secara sukarela untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

Abstract

This study aims to identify the forms of community participation in development in Lalonggowuna Village, Tongauna Subdistrict, Konawe Regency. The research uses a qualitative descriptive approach with data collected through observation, documentation, and interviews. Analysis shows that community participation is indicated by: (1) the existence

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

of groups that serve as channels for residents' participation, (2) the community's ability to take part in the development process, and (3) activities that provide space for residents to express their opinions in decision-making. However, some obstacles were identified, such as the fact that not all residents understand how to convey their aspirations effectively, particularly those with limited education or heavy work commitments. Forms of community participation in Lalonggowuna Village's development are visible across planning, implementation, and evaluation stages, including: 1. Participation in Village Deliberations (Musyawarah Desa, Musdes) to present aspirations, needs, and program proposals (e.g., infrastructure, agriculture, education, health). 2. Gotong royong (mutual cooperation) in carrying out physical development activities, such as road repairs, small bridge construction, and environmental cleanup. 3. Active involvement in community groups (Farmer Groups, Karang Taruna, PKK, LPM) that play roles in empowerment and conveying group aspirations. 4. Participation in training and outreach, including skills training, agricultural extension, and other capacity-building activities. 5. Voluntary material or monetary contributions to support and accelerate the implementation of development programs.

Keywords: *Participation, Public, Development*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan ini adalah pembangunan di tingkat desa, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Namun, pembangunan di pedesaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peran aktif dan partisipasi masyarakat desa sangatlah krusial untuk mendorong kemajuan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya berarti mendukung program pemerintah, melainkan juga melibatkan peran aktif dalam mengidentifikasi masalah, menyusun rencana, hingga pelaksanaan program. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Desa Lalonggowuna, partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah menunjukkan kemajuan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, gotong royong, dan peran aktif dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan, di mana sebagian masyarakat bersikap acuh tak acuh dengan alasan kesibukan atau merasa usulan mereka tidak berdampak langsung, khususnya terkait upaya kemandirian melalui pelatihan kewirausahaan. Kondisi ini

memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana partisipasi masyarakat di Desa Lalonggowuna benar-benar bermakna atau hanya bersifat formalitas.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti keterlibatan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk penentuan arah dan strategi kebijakan pemerintah. Dalam kamus sosiologi, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesi pribadinya. Bentuk keterlibatan ini dapat berupa ide, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau dukungan materi. Partisipasi juga mencakup pemanfaatan dan pengambilan manfaat dari hasil pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dan ide yang menyangkut kepentingan bersama, seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran dalam rapat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan: Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan, seperti menggerakkan sumber daya dan kegiatan administrasi.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan: Kesiediaan masyarakat untuk menggunakan hasil program secara sukarela.
4. Partisipasi dalam evaluasi: Keterlibatan masyarakat dalam menilai apakah tujuan program telah tercapai.

Partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk:

1. Partisipasi Langsung: Ketika individu secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

2. Partisipasi Tidak Langsung: Ketika individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada pihak lain.

Menurut Effendi, partisipasi juga dibagi menjadi dua bentuk:

1. Partisipasi vertikal: Masyarakat ikut serta dalam program yang digagas oleh pihak lain.

2. Partisipasi horizontal: Berasal dari dorongan masyarakat sendiri.

Menurut Muchlis Hamdi, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi pasif (sikap dan perilaku masyarakat) dan aktif (memikirkan nasib sendiri, menunjukkan kesadaran, menunaikan kewajiban, dan bersedia berkorban demi pembangunan).

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain:

- a. Motivasi: Dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu.
- b. Koordinasi dan Sosialisasi: Penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Pengawasan: Menilai hasil pekerjaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- d. Faktor internal: Usia, pendidikan, dan pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi seseorang.

Bentuk Partisipasi Menurut Marschall, ada tiga indikator partisipasi masyarakat:

- a. Adanya kelompok yang menjadi wadah partisipasi warga: Contohnya LPM, Karang Taruna, dan PKK.
- b. Kemampuan warga untuk aktif terlibat: Warga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, serta mengambil peran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan.
- c. Adanya kegiatan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat: Forum-forum seperti Musrenbang dan rapat desa memungkinkan warga untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan sosial, ekonomi, demografi, dan politik. Menurut Siagian (2005: 108), pembangunan desa adalah proses rangkaian usaha di lingkungan desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri sebagai pelaksana dan yang akan dibangun. Pembangunan adalah upaya kolektif yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Metode Penelitian

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Lokasi penelitian adalah Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.

Sumber Data

1. Data Primer: Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Lalonggowuna.
2. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti profil desa, laporan program pembangunan, dan monografi desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara (Interview): Dilakukan secara mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lalonggowuna.

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

2. Observasi (Observation): Pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat fenomena yang terjadi.
3. Dokumentasi (Documentation): Pengumpulan data dengan mencatat atau mengambil gambar dari dokumen-dokumen yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Penyajian Data (Data Display): Mengorganisasikan data dalam bentuk matriks, grafik, atau tabel untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing): Menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Kelompok Partisipatif sebagai Wadah Aspirasi

Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, keberadaan kelompok-kelompok partisipatif sangat penting untuk menampung aspirasi dan suara masyarakat. Kelompok-kelompok ini bisa berupa organisasi masyarakat sipil, forum warga, komunitas lingkungan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga kebutuhan dan permasalahan rakyat dapat tersampaikan secara lebih efektif. Ruang partisipasi ini mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek aktif dalam perencanaan dan pengawasan.

Lebih dari itu, kelompok-kelompok partisipatif juga memperkuat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Mereka memberikan tekanan agar kebijakan publik disusun secara transparan, adil, dan sesuai kepentingan umum. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dalam diri masyarakat terhadap pembangunan di lingkungannya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya

keterlibatan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok ini menjadi salah satu fondasi utama terciptanya pemerintahan yang inklusif dan responsif.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lalonggowuna menunjukkan bahwa pemerintah desa menjadikan kelompok seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK sebagai mitra strategis untuk menjaring aspirasi. Hal ini mengubah masyarakat dari sekadar objek menjadi subjek aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

- Wawancara dengan Kepala Desa (1 Maret 2025): "Di Desa Lalonggowuna, kami sangat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu bentuknya adalah melalui kelompok-kelompok seperti LPM, Karang Taruna, dan kelompok PKK. Mereka menjadi mitra kami dalam menampung aspirasi warga dan menyampaikan usulan program. Misalnya dalam kegiatan Musrenbang, kelompok-kelompok ini aktif menyampaikan kebutuhan warga mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi."

Hal ini didukung oleh wawancara dengan pengurus Karang Taruna, yang menjelaskan secara lebih detail bagaimana kelompok tersebut memfasilitasi aspirasi.

- Wawancara dengan Pengurus Karang Taruna (5 Mei 2025): "Karang Taruna di sini berfungsi sebagai jembatan antara pemuda dan pemerintah desa. Kami rutin mengadakan forum diskusi pemuda setiap bulan, di mana kami menghimpun ide, masukan, serta keluhan dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Hasil dari forum tersebut kami bawa ke rapat desa atau Musrenbang sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program pembangunan."

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

Sebuah contoh nyata dari partisipasi ini adalah usulan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda. Namun, pengurus Karang Taruna mengakui bahwa usulan tersebut belum terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) karena keterbatasan anggaran.

- Wawancara dengan Pengurus Karang Taruna (5 Mei 2025): "Salah satunya adalah pengadaan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda yang belum bekerja, karena banyak yang mengusulkan pelatihan agar bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, kami juga membantu pemerintah desa membentuk taman baca dan ruang kreatif untuk anak-anak muda... Hanya saja ini belum terakomodir di RPJM padahal banyak pemuda yang meminta ada pelatihan kewirausahaan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok aspirasi masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK telah memainkan peran penting dalam pembangunan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Melalui forum musyawarah, kegiatan sosial, dan program pemberdayaan, kelompok-kelompok ini berhasil menjadi wadah efektif untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan warga. Mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian, perlu diakui bahwa belum semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir sepenuhnya karena keterbatasan anggaran, sumber daya, dan skala prioritas pembangunan. Meski begitu, kehadiran kelompok-kelompok ini tetap menjadi bagian penting dari proses pembangunan yang partisipatif dan demokratis, sekaligus mencerminkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Kemampuan Masyarakat dalam Partisipasi Pembangunan

Kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan adalah kemampuan individu atau kelompok dalam suatu komunitas untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, serta mengambil peran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan di lingkungan mereka. Kemampuan ini

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Masyarakat yang memiliki kemampuan baik cenderung lebih mudah menyuarakan aspirasi, mengorganisasi diri dalam kelompok, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Sebab, program-program yang dijalankan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan kebutuhan warga. Kemampuan masyarakat juga mencerminkan tingkat kemandirian dan partisipasi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Kemampuan masyarakat di Desa Lalonggowuna untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dinilai berkembang secara positif. Kesadaran warga untuk menyuarakan aspirasi meningkat, meskipun masih ada beberapa kendala.

- Wawancara dengan Masyarakat (20 Mei 2025): "Saya melihat sekarang masyarakat sudah lebih terbuka dan aktif. Banyak yang mulai ikut rapat-rapat desa, apalagi saat Musrenbang. Mereka berani menyampaikan usulan, seperti perbaikan jalan, pembuatan saluran air, atau pengadaan pelatihan kerja... Dulu, mungkin banyak yang diam saja, tapi sekarang warga lebih sadar bahwa mereka punya hak untuk ikut menentukan arah pembangunan."

Kendala yang dihadapi antara lain pemahaman cara menyampaikan aspirasi bagi warga dengan pendidikan rendah atau kesibukan kerja. Namun, peran kelompok seperti LPM dan Karang Taruna sangat membantu menjembatani kesenjangan ini.

- Wawancara dengan Masyarakat (20 Mei 2025): "Ya, tentu masih ada [hambatan]... tidak semua orang paham cara menyampaikan aspirasi dengan baik, apalagi yang pendidikannya rendah atau sibuk bekerja. Tapi sekarang sudah mulai dibantu juga oleh kelompok seperti LPM dan Karang Taruna. Mereka sering bantu menjelaskan dan menampung pendapat warga."

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan mengalami perkembangan positif. Warga mulai lebih terbuka dan aktif dalam mengikuti kegiatan pemerintahan desa, seperti rapat dan Musrenbang. Mereka mulai berani menyuarkan berbagai usulan, seperti perbaikan infrastruktur dan pelatihan kerja. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak dan peran mereka dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka sendiri.

Masih terdapat beberapa kendala dalam partisipasi masyarakat. Tidak semua warga memahami cara menyampaikan aspirasi dengan baik, terutama mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau kesibukan pekerjaan. Meskipun begitu, kelompok-kelompok masyarakat seperti LPM dan Karang Taruna telah membantu menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan pendampingan dan menampung aspirasi warga. Secara umum, kemampuan masyarakat dalam pembangunan terus meningkat, meski masih memerlukan dukungan agar lebih merata dan efektif.

Kegiatan Penyampaian Pendapat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam penyampaian pendapat pada proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah atau forum partisipatif, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengajukan usulan, menyampaikan keluhan, dan mengemukakan pendapat mengenai program atau kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah di tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kota/kabupaten

Selain Musrenbang, masyarakat juga dapat menyampaikan pendapat melalui rapat RW/RT, forum warga, reses anggota dewan, serta melalui perwakilan di kelompok-kelompok masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK. Kegiatan ini menunjukkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang transparan, demokratis, dan berbasis kebutuhan setempat.

Masyarakat Desa Lalonggowuna difasilitasi untuk menyampaikan pendapatnya melalui forum-forum formal seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

- Wawancara dengan Masyarakat (20 Mei 2025): "Yang paling sering kami ikuti adalah Musrenbang Desa. Di situ masyarakat bisa langsung menyampaikan usulan, seperti perbaikan jalan, bantuan usaha kecil, sampai pengadaan fasilitas umum... Saya sendiri pernah mengusulkan pembangunan saluran air karena sering banjir, dan alhamdulillah sekarang sudah dikerjakan."

Keterlibatan ini memastikan pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun begitu, tidak semua usulan dapat diakomodasi.

- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (21 Mei 2025): "Sebenarnya pemerintah sudah melakukan sesuai tahapan dan cara yang baik untuk menampung partisipasi masyarakat hanya saja memang tidak semua usulan masyarakat dapat menjadi program pembangunan seperti pelatihan kewirausahaan untuk warga."

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyediakan mekanisme partisipatif, namun realisasi aspirasi tetap harus disesuaikan dengan skala prioritas, anggaran, dan sumber daya yang tersedia.

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme yang tepat untuk menampung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, seperti melalui forum musyawarah atau pertemuan warga. Hal ini menunjukkan adanya niat baik dan langkah yang sistematis dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat direalisasikan menjadi program, salah satunya adalah usulan pelatihan kewirausahaan.

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

Hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan, prioritas program, maupun sumber daya yang tersedia. Meskipun partisipasi masyarakat sudah difasilitasi dengan baik, hasil akhirnya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan dan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Ini juga menjadi catatan bahwa perlu komunikasi yang terus-menerus antara pemerintah dan masyarakat agar harapan yang disampaikan bisa sejalan dengan kenyataan pelaksanaan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Lalonggowuna dalam pembangunan terlihat dari berbagai aktivitas dan keterlibatan aktif warga pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa. Beberapa contoh bentuk partisipasi meliputi:

1. Keterlibatan dalam Musyawarah Desa (Musdes): Warga aktif menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan.
2. Gotong Royong: Masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan dan pembersihan lingkungan.
3. Kegiatan Kelompok Masyarakat: Keterlibatan aktif dalam Karang Taruna, PKK, dan LPM untuk menyuarakan aspirasi dan menjalankan program pemberdayaan.
4. Partisipasi dalam Pelatihan dan Sosialisasi: Warga aktif mengikuti pelatihan keterampilan dan sosialisasi program desa.
5. Kontribusi Material atau Dana: Masyarakat turut serta dalam swadaya untuk mempercepat pelaksanaan program.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lalonggowuna berada pada tingkat yang positif dan terfasilitasi dengan baik. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK telah berfungsi secara efektif sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga. Mekanisme partisipatif,

khususnya melalui Musrenbang, telah menjadi sarana yang inklusif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat Desa Lalonggowuna juga menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemampuan untuk berpartisipasi, yang tercermin dari keberanian mereka dalam menyampaikan usulan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tantangan, yaitu tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sepenuhnya karena adanya keterbatasan anggaran, sumber daya, dan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Secara keseluruhan, proses pembangunan di Desa Lalonggowuna telah mencerminkan upaya kolaboratif yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, menjadikannya fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Dadang Juliantara. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Fred Luthans, (2006), *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh, PT. Andi: Yogyakarta
- Freddy Numberi. 2009. *Perubahan iklim, implikasinya terhadap kehidupan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil / Freddy Numberi*. Jakarta : Citra Kreasi.
- Handoko.T.Hani.2001.*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*,Edisi. II.BPFE Yogyakarta : Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S, (2013), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi,. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartasmita. (2001). *Pembangunan nasional*. Jakarta: PT. alfabeta.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardikanto, Tatok dan Powerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Miftah Thoha. 2013, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta.

Risma Yanti, Nartin

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Lalonggowuna (Studi Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe)

Nawawi, Hadari. (2006). Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prasetya, T.I. 2008. Partisipasi dan Legal Draft. Malang: Wordpress.

Rahmawati 2021. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas program inovasi desa budi daya Jamur Tiram di desa Jenetaesa Kecamatan Simbangka Kab. Maros <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Riyadi, 2003. "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance". Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Rivai, Veithzal. 2003 Kepemimpinan dan perilaku Organisasi. Jakarta : Rajawali Press

Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2001). Paradigma Pembangunan "V" Terbalik. Jakarta: Majalah Perencanaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001.

Sondang P.Siagian, 2005, Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.

Sutikno, sobry M. (2014). Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan, Edisi Pertama. Lombok: Holistica.

Tumbel, Satria Mentari (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT.

Wahjosumidjo. 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.